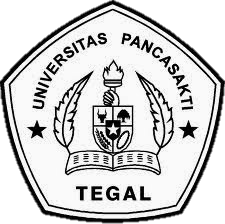
**OPTIMALISASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal**

**Oleh:**

**LUTFI YATUL MA’MUROH**

**NPM.5120600242**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

**OPTIMALISASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**

**LUTFI YATUL MA’MUROH**

**NPM.5120600242**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Tegal, 06 Februari 2025

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I  **Fajar Dian Aryani, S.H., M.H**  NIDN.0608087702 | Pembimbing II  **Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H.**  NIDN.060606600 |

Mengetahui,

|  |
| --- |
| **Plt. Dekan,**  **Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.** NIDN.0609068503 |

# PENGESAH

***OPTIMALISASI RESTITUSI TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022***

**LUTFI YATUL MA’MUROH**

**NPM.5120600242**

Telah Dipriksa dan Disahkan Oleh

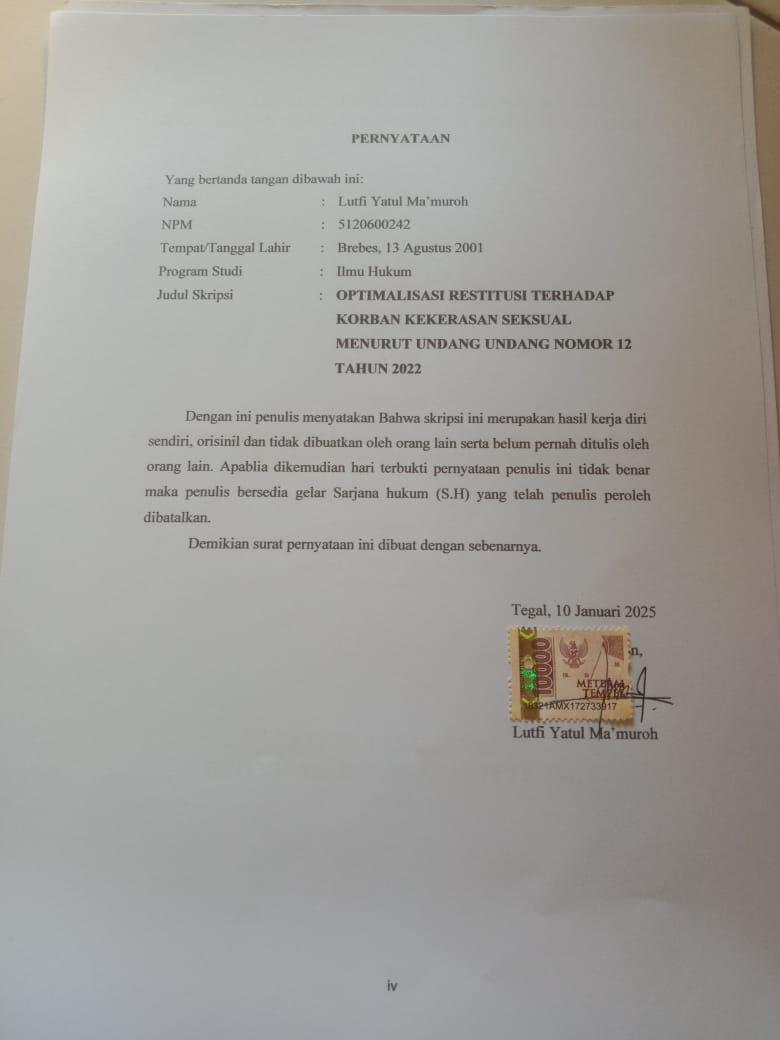
Tegal, 10 Februari 2025

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H, | (Ketua Sidang) | .............. |
| Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H | (Penguji II) | .............. |
| Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H, | (Penguji I) | .............. |
| Fajar Dian Aryani, S.H., M.H | (Pembimbing II) | .............. |
| Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. | (Pembimbing I) | .............. |

Mengetahui,

|  |
| --- |
| **Plt. Dekan,**  **Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.** NIDN.0609068503 |

# PERNYATAAN



# 

# ABSTRAK

Penelitian ini Bertujuan: (1) Untuk mendeskripsikan hak hak korban kekerasan seksual dalam Undang Undang No 12 Tahun 2022. (2) Untuk mengkaji prosedur hukum terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*library research).* Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini agar sumber data yang yang di dapat melalui penelusuran dokumen.

Hasil penelitian ini Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang biasa disebut (UUTPKS) Undang Undang ini menjelaskan pengertian korban yaitu pada pasal 1 ayat (4) yang berbunyi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan Tinak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang Undang sudah dijelaskan bahwa kekerasan seksual menimbulkan penderitaan fisik yaitu sakit pada alat vitalnya, bisa menyebabkan kehamilan, merusak reproduksinya karena koraban dipaksa melakukan aktivitas seksual, mengalami penyakit menular seksual (PMS), otak tidak bisa berfungsi secara maksimal, jika korban kekerasan seksual itu terjadi pada anak anak maka akan mengalami keterlambatan pertumbuhan pada otaknya, bisa menyebabkan meninggal. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.

**Kata Kunci:** Restitusi,Korban,Kekerasan Seksual

# *ABSTRACT*

*This research aims to: (1) Describe the rights of victims of sexual violence according to Law No. 12 of 2022. (2) Examine the legal procedures for providing restitution to victims of sexual violence.*

*This type of research uses Library Research. Library research is a method that collects information data by utilizing facilities in the library, such as books, magazines, and documents. The reason for using this type of research is to obtain data sources through document search.*

*The results of this research refer to Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, commonly known as (UUTPKS). This law defines a victim in Article 1, paragraph (4) as a person who suffers physical, mental, economic, and/or social harm caused by sexual violence. The law explains that sexual violence causes physical suffering such as pain in vital organs, can cause pregnancy, damage reproductive organs due to forced sexual activity, sexually transmitted diseases (STDs), impaired brain function, and if the victim is a child, it can result in delayed brain growth or even death.*

*Sexual violence is any act of degrading, humiliating, assaulting, and/or other acts against a person's body, sexual desire, and/or reproductive function, carried out forcibly, against a person's will, causing the person to be unable to give consent freely due to power imbalance and/or gender relations, resulting in or potentially resulting in physical, psychological, sexual suffering, and/or economic, social, cultural, and/or political loss.*

***Keywords****: Restitution, Victims, Sexual Violence.*

# LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karna dengan Rahmat dan Hidayahnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua orang tua, bapak Edi Suryono dan Ibu Sumyati yang selalu mendukung, mengingatkan dan mendoakan segala hal sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
3. Kepada Galih Setyawan Roynaldi yg sudah mendukung, mengkritik dan mendidik penulis selama menyelesaikan skripsi ini
4. Kepada Nazilatul Azmi Salsabila teman seperjuangan semasa kuliah yang selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikankan tulisan ini.
5. Kepada bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi tahun 2025.

# MOTTO

Jika benar katakan kebenaran walaupun harus berkucuran darah.

Sesungguhnya Allah maha melihat mendengar dan mengetahui segala perbuatan baik dan buruk semua manusia.

Seperti keadilan

*Fiat Justitia Ruat Caelum*

Keadilan harus ditegakan walupun langit akan runtuh.

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., Tuhan semesta Alam Allhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan apapun. Dengan selesainya skripsi ini juga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum yang ditempuh di Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryanti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sekaligus Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Dr. Mohammad Khamim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I.

# DAFTAR ISI

[**JUDUL** Error! Bookmark not defined.](#_Toc192614856)

[**PERSETUJUAN PEMBIMBING ii**](#_Toc192614857)

[**PENGESAH iii**](#_Toc192614858)

[**PERNYATAAN iv**](#_Toc192614859)

[**ABSTRAK v**](#_Toc192614860)

[***ABSTRACT* vi**](#_Toc192614861)

[**LEMBAR PERSEMBAHAN vii**](#_Toc192614862)

[**MOTTO viii**](#_Toc192614863)

[**KATA PENGANTAR ix**](#_Toc192614864)

[**DAFTAR ISI x**](#_Toc192614865)

[**BAB I PENDAHULUAN 1**](#_Toc192614866)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc192614867)

[B. Rumusan Masalah 13](#_Toc192614868)

[C. Tujuan Penelitian 13](#_Toc192614869)

[D. Urgensi Penelitian 13](#_Toc192614870)

[E. Tinjauan Pustaka 14](#_Toc192614871)

[F. Metode Penelitian 18](#_Toc192614872)

[G. Rencana Sistematika Penulisan 21](#_Toc192614873)

[**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 23**](#_Toc192614874)

[A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual 23](#_Toc192614875)

[B. Tinjauan Umum Tentang Jenis Jenis Kekerasan Seksual Menurut Undang Undang 27](#_Toc192614876)

[C. Tinjauan Umum Tentang Korban 30](#_Toc192614877)

[D. Tinjauan Umum Tentang Restitusi 38](#_Toc192614878)

[**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51**](#_Toc192614879)

[A. Bagaimana pengaturan hak hak korban kekerasan seksual menurut Undang Undang Nomor 12 tahun 2022 51](#_Toc192614880)

[B. Bagaimana prosedur hukum terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual 93](#_Toc192614881)

[**BAB IV PENUTUP 147**](#_Toc192614882)

[A. Simpulan 147](#_Toc192614883)

[B. Saran 150](#_Toc192614884)

[**DAFTAR PUSTAKA 152**](#_Toc192614885)

[**DAFTAR RIWAYAT HIDUP 157**](#_Toc192614886)

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Kekerasan secara seksual merupakan permasalahan yang kerap menjadi topik pembicaraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kasus ini dapat menimpa siapa saja dan terjadi kapan pun. Hingga kini, kekerasan seksual masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, sehingga para korban sering kali merasa terbebani dan enggan untuk berbicara atau mencari bantuan. Tindakan ini tidak hanya terjadi antara individu dengan jenis kelamin berbeda, tetapi juga dapat terjadi di antara sesama jenis. Kekerasan seksual bisa berlangsung berulang kali atau terjadi hanya dalam satu kejadian, namun dampaknya tetap serius bagi korban.[[1]](#footnote-1)

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (gender-based violence) yang merujuk pada segala tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Kekerasan ini tidak hanya terbatas pada kontak fisik, tetapi juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan tertentu, pemaksaan, hingga berbagai bentuk pembatasan kebebasan seseorang. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual terjadi dalam berbagai lingkungan, seperti rumah tangga, tempat kerja, institusi pendidikan, maupun ruang publik. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu oleh korban, tetapi juga dapat berdampak sosial, menciptakan ketidakadilan gender yang semakin memperkuat budaya kekerasan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait.[[2]](#footnote-2)

Kekerasan seksual tidak-lah hanya berbentuk kekerasan langsung tetapi juga terjadi dalam bentuk kekerasan tidak langsung yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan struktur sosial, terutama akibat adanya stereotip tertentu terhadap korban. Karena terjadi secara sistematis dan meluas, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling serius. Dalam bukunya *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Mansour Fakih menyatakan bahwa kekerasan merupakan bentuk serangan atau invasi terhadap fisik serta integritas mental dan psikologis seseorang.

Menurut Komisi Nasional Perempuan, kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pelecehan seksual terbagi menjadi pelecehan verbal dan nonverbal. Pelecehan seksual verbal dapat berupa godaan bernada seksual, candaan yang bersifat melecehkan, menulis surat dengan muatan seksual, bersiul, ajakan kencan yang tidak diinginkan, serta menyebarkan gosip atau cerita mengenai kehidupan seksual seseorang. Selain itu, pelecehan verbal juga dapat mencakup tekanan atau paksaan untuk mendapatkan kenikmatan seksual.

Selama ini, kasus kekerasan seksual sering kali dianggap remeh oleh masyarakat, sehingga penyelesaiannya kerap dilakukan dengan cara-cara yang tidak berpihak pada korban. Misalnya, pelaku hanya diminta membayar ganti rugi dalam bentuk uang, menikahi korban, atau membayar denda kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan infrastruktur seperti mengaspal jalan dan sebagainya. Dalam konteks keadilan restoratif, mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti semula setelah terjadinya tindak pidana. Secara teori, pendekatan ini memiliki niat baik dalam memperbaiki hubungan sosial dan memulihkan keadaan. Namun, pertanyaannya adalah, apakah mekanisme ini benar-benar dapat menghadirkan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual? Mengingat dampak kekerasan seksual tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup trauma psikologis yang mendalam, proses pemulihan yang panjang, bahkan bisa berlangsung seumur hidup, apakah pendekatan ini cukup untuk mengembalikan hak-hak korban? Keadilan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, tetapi juga harus menjamin bahwa pelaku menerima hukuman yang sepadan, sementara korban mendapatkan perlindungan dan dukungan untuk proses pemulihannya.[[3]](#footnote-3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan menjadi payung hukum tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memastikan proses hukum yang lebih tegas terhadap pelaku. Pasal 23 UU TPKS menyatakan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual harus diselesaikan melalui proses peradilan dan tidak dapat diselesaikan di luar jalur hukum, kecuali jika pelakunya merupakan anak, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual harus diproses melalui jalur hukum formal, sehingga mencegah adanya praktik penyelesaian yang merugikan korban, seperti mediasi atau kesepakatan damai yang sering kali tidak berpihak kepada korban.[[4]](#footnote-4)

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, ketentuan yang ada tidak secara eksplisit mengatur mengenai konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keadilan restoratif dapat diterapkan dalam kasus kekerasan seksual, mengingat pendekatan ini umumnya bertujuan untuk memulihkan keadaan korban dan memperbaiki hubungan sosial. Karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana suatu kekerasan seksual dalam kaitannya keadilan restoratif. Kajian ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti dampak psikologis terhadap korban, potensi penyalahgunaan mekanisme ini oleh pelaku untuk menghindari hukuman, serta bagaimana prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan tanpa mengorbankan hak-hak korban. Oleh karena itu, pembahasan lebih mendalam terkait integrasi konsep keadilan restoratif dalam UU TPKS menjadi hal yang sangat krusial untuk menjamin keadilan yang sesungguhnya bagi korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur sanksi bagi pelaku pelecehan seksual, baik secara nonfisik maupun fisik. Pelecehan seksual nonfisik, seperti komentar, isyarat, atau perilaku melecehkan atau merugikan nilai dan kehormatan seseorang berdasarkan aspek seksual atau moralitasnya., dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00. Pelecehan fisik melibatkan kontak langsung dengan tubuh korban, diancam pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda terbanyak Rp50.000.000,00. Aturan ini dirancang untuk melindungi hak hukum korban, mencegah terjadinya pelecehan seksual, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi tindakannya.[[5]](#footnote-5)

Setiap individu berhubungan secara seksual terhadap seseorang yang bukan merupakan suami atau istrinya dapat dikenai sanksi pidana atas tindakan perzinaan. Sanksi pidananya maksimal satu tahun atau denda dengan jumlah paling tinggi kategori II, yakni sebesar Rp10.000.000,00. Aturan ini bertujuan untuk menegakkan norma kesusilaan dalam masyarakat serta memberikan batasan hukum yang jelas terhadap tindakan yang dianggap melanggar nilai-nilai perkawinan dan moral. Namun, penerapan pasal ini sering kali memunculkan perdebatan terkait ruang lingkup privasi individu serta relevansinya dalam konteks hukum modern yang semakin dinamis. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji ketentuan ini guna memastikan keseimbangan antara penegakan hukum dan hak-hak individu dalam kehidupan sosial.

Ada 37 bab dalam KUHP dan salah satunya bab tentang kesusilaan yang mengatur tentang sekerasan sekual secara umum. Kasus kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja baik perempuan, anak, maupun laki-laki. Kebanyakan korban kekerasan seksual berasal dari perempuan dan tidak bisa di pungkiri juga kasus kekerasan seksual bisa menimpa laki laki, walaupun tidak sebanyak perempuan dan anak.[[6]](#footnote-6)

Seorang perempuan dan seorang anak lebih dominan sebagai ‘korban’ karena di anggap lemah dan rentang serta tubuh dari perempuan yang membuat banyak laki-laki menyukainya, sehingga perempuan lebih banyak menjadi subyek kekerasan seksual. Tidak sedikit juga yang menyakahkan perempuan dalam kasus kekerasan seksual, pelaku menganggap bahwa perempuan dulu yang memancing mulai dari berpakaianny, dari kedipan matanya, dari cara berbicaranya, dari cara berjalan dan juga dari aroma tubuhnya yang harum sehingga pelaku menyalahkan korban. Prempuan menjadi korban dan perempuan juga yang disalahkan.[[7]](#footnote-7)

KUHP belum secara jelas menetapkan aturan yang secara langsung dan spesifik memberikan perlindungan dalam konteks hukum bagi korban kejahatan. Selain itu, KUHP juga tidak mengatur secara spesifik mengenai jenis-jenis pidana restitusi atau ganti rugi, yang sebenarnya memiliki peran penting dalam membantu pemulihan korban serta memberikan kompensasi bagi keluarga korban. Padahal, keberadaan mekanisme restitusi dapat menjadi bentuk keadilan yang lebih menyeluruh, tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban.[[8]](#footnote-8) Peran saksi dan korban dalam mengungkap fakta terjadinya suatu peristiwa pidana sangatlah krusial, karena kesaksian mereka dapat menjadi bukti utama dalam proses peradilan. Saksi memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan yang jujur dan objektif guna membantu aparat penegak hukum dalam merekonstruksi kejadian secara akurat. Sementara itu, korban, sebagai pihak yang mengalami langsung dampak dari tindak pidana, memiliki posisi penting dalam memberikan informasi terkait kronologi kejadian, motif pelaku, serta akibat yang ditimbulkan. Keterangan dari saksi dan korban tidak hanya membantu dalam membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga berperan dalam memastikan keadilan bagi korban, maka perlindungan ini menjadi hal yang esensial agar mereka dapat memberikan kesaksian tanpa tekanan atau ancaman, serta mendapatkan hak-hak yang layak dalam proses peradilan perkara pidana.[[9]](#footnote-9)

Para saksi dan korban merupakan individu yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar secara langsung kejadian suatu tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, saksi dan korban kerap menghadapi berbagai bentuk tekanan, seperti intimidasi, gangguan, ancaman, teror, hingga tindak kekerasan dari pihak-pihak yang berseberangan. Upaya tersebut bertujuan untuk menggagalkan atau menghalangi mereka dalam memberikan kesaksian yang dapat mengungkap kebenaran dalam proses hukum. Maka sangat esensial perlindungan hukum terhadapnya agar mereka dapat menyampaikan kesaksian tanpa rasa takut dan mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Keberadaan mekanisme perlindungan hukum yang kuat sangat penting dalam menjamin bahwa seorang saksi dan seorang korban berperan secara jujur dalam menegakkan keadilan tanpa harus menghadapi ancaman yang menghambat proses peradilan.

Kekerasan seksual dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yakni kekerasan secara verbal dan kekerasan secara fisik. Kasus kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa pun, di mana pun, dan kapan pun, tanpa terbatas oleh waktu atau lokasi. Fenomena ini marak terjadi di berbagai lingkungan sekitar kita, seperti kasus incest (hubungan seksual dengan anggota keluarga sedarah), pemerkosaan di lingkungan pendidikan, serta pelecehan di tempat kerja. Namun KUHP belum secara penuh memberikan perlindungan terhadap korban. KUHP lebih berfokus pada aspek pemidanaan pelaku, tanpa mengakomodasi kebutuhan korban dalam hal pemulihan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Regulasi yang lebih komprehensif dan berpihak pada korban agar mereka mendapatkan keadilan yang sesungguhnya serta perlindungan hukum yang efektif.[[10]](#footnote-10)

KUHP masih berorientasi pada pemidanaan pelaku tanpa secara komprehensif mempertimbangkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual. Fokus utama KUHP adalah memberikan sanksi bagi pelaku, namun belum secara eksplisit mengatur mekanisme pemulihan bagi korban, seperti restitusi, rehabilitasi psikologis, serta perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, KUHP juga belum sepenuhnya mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan teknologi, berupa kekerasan berbasis gender daring, pelecehan siber, atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan (distribusi gambar intim tanpa izin). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan berpihak pada korban agar perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual dapat berjalan lebih efektif serta selaras dengan dinamika masyarakat saat ini.[[11]](#footnote-11)

Posisi korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum optimal dibandingkan dengan posisi pelaku. Meskipun secara prinsip hukum, korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (equality before the law), dalam praktiknya, sistem peradilan pidana masih lebih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban. Akibatnya, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam bentuk bantuan hukum, pemulihan psikologis, maupun ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit kerap menjadi faktor yang membuat korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami.[[12]](#footnote-12)

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang ditujukan kepada perempuan dan berdampak negatif, baik secara mental atau psikologis maupun fisik. Dampak psikologis yang ditimbulkan bisa berupa perasaan takut, tekanan mental, hingga trauma berkepanjangan, sementara dampak fisiknya bisa berupa luka atau cedera akibat kekerasan langsung. Definisi ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pelecehan seksual ringan seperti siulan atau godaan yang merendahkan martabat perempuan, hingga tindakan yang lebih serius seperti kekerasan fisik dan seksual. Selain itu, bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga dapat terjadi secara struktural, misalnya dalam bentuk pembiaran oleh negara terhadap kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan tanpa adanya perlindungan atau upaya pemulihan yang memadai.

Kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan, mulai dari pelecehan seksual hingga pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, baik ketika korban secara tegas menolak maupun ketika ia berada dalam kondisi yang tidak berdaya untuk memberikan persetujuan. Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Korban sering kali mengalami trauma mendalam, tekanan emosional, bahkan stigma dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kekerasan seksual memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat, guna memastikan adanya perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban.[[13]](#footnote-13)

Kekerasan seksual menimbulkan berbagai dampak yang serius bagi korban, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Pertama, dampak psikologis, korban sering mengalami trauma mendalam yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mentalnya. Gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan depresi dapat menghambat fungsi serta perkembangan otak, terutama pada anak-anak. Kedua, Dari segi dampak fisik, kekerasan seksual dapat meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual (PMS) serta berisiko menyebabkan cedera internal dan pendarahan. Dalam kasus yang lebih serius, korban dapat mengalami kerusakan pada organ dalam yang membahayakan kesehatannya. Sementara itu, dari aspek sosial, korban kekerasan seksual kerap menghadapi stigma dan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Mereka dapat dikucilkan, dijauhi, bahkan disalahkan atas kejadian yang menimpanya, sehingga semakin memperburuk kondisi psikologis dan emosional mereka. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dalam upaya pemulihan korban, termasuk dukungan psikologis, medis, serta perlindungan hukum agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.[[14]](#footnote-14)

Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan memberikan manfaat bagi semua pihak, baik korban maupun pelaku kejahatan, dalam rangka menciptakan keseimbangan dalam sistem hukum. Menurut Aristoteles, dalam teori etisnya, tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan hak yang layak kepada setiap individu. Sementara itu, Jeremy Bentham, melalui teori utilitas (utility), menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat atau faedah bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan bagi banyak orang dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan antara penegakan keadilan dan manfaat sosial sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.[[15]](#footnote-15)

Alasan penulis mengambil judul ini karena penulis ingin mengkaji UU No.12 tahun 2022 yang membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual dan belum banyak yang mengkaji terutama dalam Restitusi. Penulis memilih judul tersebut juga karena menganalisis keadaan sekitar dimana korban belum mendapatkan hak layak untuk mendapatkan restitusi yg sesuai dangan UU yang berlaku di Indonesia baik dalam KUHP maupun UU yang lebih spesifik UU No 12 tahun 2022.[[16]](#footnote-16)

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak hak korban kekerasan seksual menurut Undang Undang No 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana prosedur hukum terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan hak hak korban kekerasan seksual dalam Undang Undang No 12 Tahun 2022
2. Untuk mengkaji prosedur hukum terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual.

## Urgensi Penelitian

1. Adanya penelitian ini di harapkan mampu menciptakan keadilan dengan restitusi yang di berikan kepada korban kekerasan seksual.
2. Agar korban mendapatkan kejelasan hak dan penyelesaiannya dimata hukum.

## Tinjauan Pustaka

1. Eko Nurisman 2022 “Risalah Tentang Penegakan Hukum Tindak pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022” Fakultas hukum Universitas Internasional Batam tujuan penelitian ini untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UUTPKS. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.[[17]](#footnote-17) Berdasarkan penelitian sebelumnya Persamaan yang akan diangkat yaitu mengkaji Undang Undang Nomor 12 tahun 2022, kemudian perbedaanya penulis mengangkat skripsi berjudul “Optimalisasi Restitusi terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022” Yang mengulas mengenai hak-hak korban kekerasan seksual serta penegakan hukum dalam pemberian restitusi bagi mereka. Penulis menerapkan metode yuridis normatif dengan menganalisis data secara kualitatif berdasarkan sumber yang diperoleh melalui studi kepustakaan. [[18]](#footnote-18)
2. Siti Fatimah 2023 “Hak korban Kekerasan Seksual” Program studi administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tujuan penelitian ini untuk mementukan hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS. [[19]](#footnote-19) Peneitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dekriptif. Berdasarkan penelitian sebelumnya persamaan yang diangkat penulis yaitu Mengkaji Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022, kemudian perbedaanya penulis mengangkat skripsi berjudul berjudul “Optimalisasi Restitusi terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022” yang membahas tentang hak hak korban kekerasan seksual dan penegakan hukum terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual. penulis menggunakan metode normatif yuridis dengan melakukan analisis data kualitatif melalui sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.[[20]](#footnote-20)
3. Gerda Haldist Napitupulu 2023 “Peraturan Hukum Dan Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual” Program studi hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Penelitian ini menganalisis regulasi hukum dan tanggung jawab pelaku cat calling berdasarkan asas kepastian hukum serta perlindungan hak korban sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[[21]](#footnote-21) Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau yuridis normatif, yang tidak hanya mengkaji hukum dari aspek normatif, tetapi juga menganalisis implementasinya di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah konseptual dengan data sekunder. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian terhadap UU No. 12 Tahun 2022, namun berbeda dalam fokus. Skripsi ini membahas optimalisasi restitusi bagi korban kekerasan seksual serta upaya penegakan hukumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan.[[22]](#footnote-22)
4. Fajar Dian Aryani 2022 “Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan” Program Studi Ilmu Hukum Universitas Panca Sakti Tegal, Peranan Polisi dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan melalui Unit PPA cukup strategis dalam penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak menyangkal bahwa POLRI merupakan garda terdepan dalam upaya memutus mata rantai kekerasan terhadapperempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperlukan adanya mekanisme penanganan yang komprehensif dari akar masalah sampai korban mendapatkan keadilan dan pelaku menjadi jera. efisiensi dan efektivitas pelayanan.[[23]](#footnote-23) kemudian perbedaanya penulis mengangkat skripsi berjudul berjudul “Optimalisasi Restitusi terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022” yang membahas tentang hak hak korban kekerasan seksual dan penegakan hukum terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual. penulis menggunakan metode normatif yuridis dengan melakukan analisis data kualitatif melalui sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.
5. Fajar Ari Sadewo 2024 “Kebijakan Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pemerkosa Anak” Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak pada dasarnya mengatur tentang batasan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pemerkosaan anak. Penggunaan sanksi, seperti hukuman mati, bagi mereka yang bertanggung jawab atas pemerkosaan anak di Indonesia masih menjadi topik diskusi. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem penerapan hukuman tambahan, seperti hukuman mati yang lebih berat, saat ini terbatas pada pelaku kejahatan seksual dewasa. Hukuman mati merupakan solusi terakhir dalam menangani pedofil. Namun menurut Pasal 81 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, jika pemerkosa anak masih di bawah umur, maka hukuman mati tidak berlaku sesuai ketentuan negara. Penjatuhan hukuman mati merupakan kebijaksanaan hakim, bukan keharusan.[[24]](#footnote-24) Kemudian perbedaanya penulis mengangkat skripsi berjudul berjudul “Optimalisasi Restitusi terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022” yang membahas tentang hak hak korban kekerasan seksual dan penegakan hukum terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual. penulis menggunakan metode normatif yuridis dengan melakukan analisis data kualitatif melalui sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian metode library research ialah suatu metode yang mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan utama dalam pengumpulan data dan informasi. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui berbagai referensi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, jurnal, majalah, dokumen hukum, serta sumber literatur lainnya yang relevan. Alasan pemilihan metode ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berasal dari dokumen yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan demikian, penelitian ini analisis yang mendalam dan berbasis pada teori serta regulasi yang sudah ada, sehingga dapat memperkaya pemahaman terhadap topik yang dikaji.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara normatif yaitu studi yang berfokus pada analisis dokumen dengan mengandalkan berbagai sumber hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai restitusi bagi korban kekerasan seksual, dengan menelaah bagaimana ketentuan hukum yang berlaku memberikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengkaji efektivitas regulasi yang ada serta implikasinya dalam praktik hukum di masyarakat.

1. Data Penelitian

Data penelitian ialah data sekunder. Data sekunder adalah segala bentuk dari informasi sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Data ini umumnya berupa dokumen resmi, seperti naskah akademik, regulasi, serta literatur yang relevan. Dalam penelitian ini, sumber utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemilihan data sekunder didasarkan pada pertimbangan efektivitas, karena data tersebut sudah dipublikasikan sehingga lebih cepat dan mudah diakses. Selain itu, penggunaan data sekunder juga lebih efisien secara biaya, tanpa memerlukan pengumpulan data langsung yang memerlukan sumber daya lebih besar.

1. Metode Pengmpulan Data
2. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu bahan hukum yang memiliki kuasa mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam proses pembuatan hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari objek penelitian sebagai sumber utama informasi yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi dasar utama dalam menganalisis aspek hukum terkait perlindungan dan restitusi bagi korban kekerasan seksual.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi ini dapat berupa skripsi, tesis, disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang membahas berbagai aspek peraturan dan praktik hukum. Selain itu, terdapat pula data sekunder sebagai pendukung, seperti buku referensi, artikel ilmiah, jurnal hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia. Bahan hukum sekunder berperan penting dalam memberikan perspektif tambahan, memperkaya analisis, serta mendukung pemahaman lebih mendalam terhadap isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk membedah dan mengeksplorasi permasalahan yang akan di teliti.[[25]](#footnote-25) Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang di susun secara sistematis untuk pelaksanaan program sehingga bisa digunakan sebagai landasan untuk pengembangan teori.

## Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun secara berurutan dan sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan laporan penelitian meliputi:

BAB I Pendahuluan, Dalam bab pendahuluan meliputi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Urgensi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Rencana Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual, Meliputi tinjauan umum tentang korban, tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang kekerassan seksual,

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi penguraian hasil rumusan masalah tentang optimalisasi restitusi terhadap korban kekerasan seksual menurut undang-undang no 12 tahun 2022 yang meliputi hak hak korban kekerasan seksual, penegakan hukum terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual.

BAB IV Penutup, meliputi simpulan dan saran dari penelitian ini

# BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan cedera, kematian seseorang, atau menyebabkan kerusakan terhadap fisik maupun barang milik orang lain. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara fisik maupun nonfisik, dan sering kali berdampak pada aspek psikologis serta sosial bagi korbannya.[[26]](#footnote-26) Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (gender-based violence) yang didefinisikan sebagai tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau penderitaan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Kekerasan ini tidak hanya mencakup kontak fisik secara langsung, tetapi juga meliputi ancaman terhadap tindakan tertentu, pemaksaan, serta berbagai bentuk perampasan kebebasan individu. Bentuk kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi, termasuk di lingkungan domestik, tempat kerja, institusi pendidikan, hingga ruang publik dan dunia digital. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga dapat memperkuat ketidakadilan sosial dan gender dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban harus terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.[[27]](#footnote-27)

Kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*) mencakup tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan atau kerusakan fisik, seksual, maupun psikologis bagi korban. Kekerasan ini tidak-lah bentuk tindakan langsung saja, melainkan juga mencakup ancaman, pemaksaan, serta berbagai bentuk perampasan kebebasan yang melanggar hak asasi seseorang. Kekerasan seksual terjadi dalam segala kondisi dan tempat serta sering kali berdampak jangka panjang terhadap korban, baik secara emosional, sosial, maupun fisik.[[28]](#footnote-28)

Kekerasan seksual termasuk dalam bentuk kekerasan langsung yang mencakup tindakan pemaksaan terhadap seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal melalui ucapan yang melecehkan maupun secara fisik melalui perbuatan yang melanggar batas privasi dan hak korban. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif serta penegakan hukum yang tegas guna melindungi korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masyarakat.[[29]](#footnote-29) Tindakan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk menguasai, mengendalikan, atau memanipulasi korban. Salah satu aspek utama dalam kekerasan seksual adalah adanya unsur pemaksaan serta ketiadaan persetujuan dari korban. Dalam beberapa kasus, korban mungkin tidak dapat memberikan persetujuan secara sadar dan bebas, seperti pada anak-anak atau individu dengan disabilitas intelektual, yang secara hukum maupun moral tidak memiliki kapasitas penuh untuk menyetujui tindakan tersebut. [[30]](#footnote-30)

Kekerasan seksual "kekerasan" dan "seksual." Istilah ini sering dikaitkan dengan sexual hardness, di mana hardness memiliki makna kekerasan, ketidakenakan, dan keterbatasan kebebasan. Istilah "seksual" tidak terlepas dari konsep "seks" dan "seksualitas." Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dikenal sebagai jenis kelamin, sementara seksualitas mencakup aspek yang lebih luas, termasuk dimensi biologis, sosial, psikologis, dan budaya. Dimensi-dimensi ini berperan dalam membentuk pemahaman serta pengalaman seseorang terhadap identitas dan perilaku seksualnya dalam kehidupan sosial.[[31]](#footnote-31) Secara umum seksualita dapat di kelompokkan menjadi beberapa bentuk.

1. Biologis: Seksualitas dalam dimensi biologis berfokus pada aspek fisik, termasuk kenikmatan tubuh dan fungsi reproduksi. Menjaga kesehatan organ reproduksi serta mengoptimalkan fungsinya merupakan bagian dari seksualitas dalam aspek ini.
2. Sosial: Dalam dimensi sosial, seksualitas dipengaruhi oleh hubungan sosial yang membentuk pandangan seseorang terhadap seksualitas. Interaksi dengan lingkungan dan norma sosial berperan dalam membentuk perilaku seksual individu.
3. Psikologis: Dari sudut pandang psikologis, seksualitas terkait dengan peran manusia sebagai makhluk sosial, meliputi identitas gender, peran dalam masyarakat, serta dinamika psikologis yang mempengaruhi sikap dan pemahaman individu terhadap seksualitas.
4. Kultural: Perbuatan seksual tidak terlepas dari budaya dalam suatu masyarakat. Norma, nilai, dan tradisi yang berkembang dalam suatu budaya dapat memengaruhi cara pandang dan praktik seksual.[[32]](#footnote-32)

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena dapat menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk trauma berkepanjangan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur kekerasan seksual sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi korban serta menegakkan keadilan. Kekerasan seksual, yang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, merupakan tindakan kasar dengan tujuan seksual yang sering melibatkan ancaman atau pemaksaan. Dalam lingkup rumah tangga, kekerasan seksual antara suami dan istri masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika dilakukan tanpa persetujuan, dengan ancaman, atau pemaksaan, tindakan ini termasuk pemerkosaan, yang merupakan pelanggaran hukum berat.

## Tinjauan Umum Tentang Jenis Jenis Kekerasan Seksual Menurut Undang Undang

* 1. Jenis Jenis Kekerasan Seksual

Dalam KUHP istilah "pelecehan seksual" secara eksplisit tidak disebutkan, melainkan hanya mengatur mengenai "perbuatan cabul" pada Buku II Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan, yakni dalam Pasal 281 hingga 303. Perbuatan cabul dalam KUHP didefinisikan sebagai segala tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau perbuatan tidak senonoh yang didasari oleh nafsu seksual. Sementara itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), berbagai bentuk kekerasan seksual telah dirinci lebih lanjut dalam Pasal 4, yang mencakup pelecehan seksual nonfisik. Pelecehan seksual nonfisik meliputi pernyataan, gerakan tubuh, atau tindakan lain yang tidak pantas dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan, mempermalukan, atau melecehkan korban.

Kemudian dalam pasal 4 ayat 2 mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menerangkan bahwa kekerasan seksual juga meliputi

* 1. Pemerkosaan, pemerkosaan adalah suatu perbuatan Tindak kriminal dengan motif seksual terjadi ketika seseorang memaksa individu lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina oleh penis tanpa persetujuan, dengan paksaan, ancaman, atau kekerasan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Korban dapat mengalami luka fisik, trauma mendalam, serta stigma dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta perlindungan yang maksimal bagi korban guna mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual secara efektif.[[33]](#footnote-33)
  2. Pencabulan, pencabulan adalah suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan norma.
  3. Persetubuan terhadap anak, adalah perbuatan yang dilakukan kepada anak dibawah umur dengan tujuan perbuatan seksual.
  4. Perbuatan cabul terhadap anak, suatu perbuatan yg melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur.
  5. Eksploitasi seksual terhadap anak, yaitu tindakan pemanfaatan anak untuk aktivitas seksual dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi pihak lain, baik dalam bentuk materi maupun non-materi.
  6. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, mencakup segala tindakan tidak senonoh yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan melanggar norma kesopanan serta moral yang berlaku.
  7. Perbuatan pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, termasuk produksi, distribusi, atau konsumsi materi pornografi yang mengeksploitasi anak maupun yang menggambarkan kekerasan seksual secara gamblang.
  8. Pemaksaan pelacuran, yaitu tindakan memaksa seseorang untuk terlibat dalam praktik prostitusi melalui ancaman, kekerasan, atau bentuk paksaan lainnya demi keuntungan pihak tertentu.
  9. Tindak pidana perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, yakni perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penampungan seseorang dengan tujuan eksploitasi seksual, sering kali dilakukan melalui penipuan, paksaan, atau ancaman.
  10. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, meliputi segala bentuk pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual yang terjadi dalam hubungan domestik, baik antara pasangan suami istri maupun anggota keluarga lainnya.
  11. Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual, yaitu tindakan menyamarkan atau mengelola hasil kejahatan dari tindak pidana kekerasan seksual agar terlihat legal atau tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk tindak pidana lain yang secara eksplisit dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan ini bertujuan untuk: (a) mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual, (b) menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual, (c) menegakkan hukum secara adil serta merehabilitasi pelaku kejahatan, (d) menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, dan (e) memastikan bahwa kekerasan seksual tidak terulang dalam masyarakat.

## Tinjauan Umum Tentang Korban

* 1. Pengertian Korban menurut Para Ahli

Korban adalah orang atau kelompok yang mengalami penderitaan atau kerugian, atau orang yang kehilangan hak asasi manusia. Korban bisa mengalami penderitaan fisik, mental, psikis, emosional.

Ada babarapa pengertian korban menurut beberapa ahli

* 1. Menurut Arif Gosita, Korban adalah individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, akibat tindakan pihak lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hak asasi korban. Penderitaan yang dialami korban dapat berupa luka fisik, trauma emosional, maupun dampak sosial yang mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.[[34]](#footnote-34)
  2. Romli Atmasasmita, Korban adalah individu yang mengalami penderitaan akibat tindakan kekerasan, namun sering kali diabaikan oleh negara dalam hal perlindungan dan pemulihan hak-haknya. Meskipun korban telah berusaha mencari keadilan dengan menuntut dan menghukum pelaku, tidak jarang mereka menghadapi berbagai hambatan, baik dalam proses hukum maupun dalam mendapatkan perlindungan yang layak dari negara. Hal ini menunjukkan perlunya sistem hukum yang lebih responsif dalam menangani kasus kekerasan dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.[[35]](#footnote-35)
  3. Muladi, Korban (victims) adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun gangguan signifikan terhadap hak-hak fundamental mereka. Kerugian ini dapat disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana di suatu negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks hukum, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta akses terhadap keadilan guna memastikan bahwa hak-hak mereka tidak diabaikan.[[36]](#footnote-36)

Berdasarkan definisi di atas, korban tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok yang secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu tindakan, tetapi juga mencakup keluarga serta orang-orang terdekat yang terkena dampak secara tidak langsung. Dengan kata lain, efek dari tindakan yang merugikan dapat meluas ke lingkungan sosial korban, baik dalam bentuk tekanan emosional, trauma psikologis, hingga kesulitan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak kekerasan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik, yang dapat memengaruhi dinamika keluarga serta hubungan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, pendekatan dalam perlindungan dan pemulihan korban harus bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan aspek yang lebih luas, termasuk penyediaan dukungan psikososial bagi keluarga dan orang-orang terdekat yang turut terdampak, guna memastikan proses pemulihan yang lebih efektif dan menyeluruh.

* 1. Pengertian Korban Menurut Undang Undang dan Peraturan Pemerintah

Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami kerugian, baik fisik, mental, ekonomi, maupun sosial akibat tindakan kekerasan seksual. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban adalah seseorang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang signifikan akibat tindak kekerasan yang dialaminya.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, definisi korban memiliki cakupan yang luas dan bervariasi tergantung pada konteks tindak pidana yang terjadi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, korban mencakup mereka yang menderita, meninggal dunia, atau hilang akibat kecelakaan, bencana, atau situasi berbahaya lainnya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara spesifik mengatur bahwa korban adalah individu yang mengalami penderitaan psikis, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mendefinisikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat aksi terorisme. Dengan adanya berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa konsep korban dalam hukum Indonesia tidak hanya mencakup individu yang mengalami dampak langsung, tetapi juga mempertimbangkan jenis tindak pidana serta konsekuensi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pendekatan dalam perlindungan dan pemulihan korban harus disesuaikan dengan karakteristik kasus yang dihadapi guna memastikan pemenuhan hak dan kesejahteraan mereka secara optimal. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban mencakup individu yang mengalami berbagai bentuk penderitaan, baik akibat kejahatan, bencana, maupun tindakan yang membahayakan keselamatan manusia.

Definisi korban juga diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah di Indonesia dengan cakupan yang luas, mencakup individu maupun kelompok yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana atau pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000, korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 memperluas cakupan definisi korban dengan mencakup kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, maupun kerugian ekonomi. Selain itu, korban juga dapat mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam konteks ini, ahli waris korban juga termasuk sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan, kompensasi, atau pemulihan hak-hak mereka. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi di Indonesia memberikan definisi korban secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami penderitaan langsung, tetapi juga mencakup kelompok serta ahli waris yang terkena dampak. Pendekatan ini menegaskan pentingnya perlindungan yang lebih luas serta pemenuhan hak-hak korban dalam berbagai aspek hukum dan sosial.

Berdasarkan berbagai Peraturan Pemerintah di Indonesia, definisi korban memiliki cakupan yang luas dan beragam sesuai dengan konteksnya. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa korban mencakup individu atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sehingga memerlukan perlindungan dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Dalam konteks bencana atau kecelakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 mengartikan korban sebagai mereka yang mengalami penderitaan, kehilangan, atau kematian akibat kecelakaan, bencana alam, musibah pelayaran, penerbangan, atau peristiwa lain yang berisiko tinggi terhadap keselamatan manusia. Dengan demikian, istilah korban dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup berbagai bentuk penderitaan, baik akibat tindakan melanggar hukum, kecelakaan, bencana alam, maupun pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia mengakui pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi korban dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Definisi ini menegaskan bahwa dampak yang dialami korban tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga dapat mencakup trauma psikologis serta kesulitan ekonomi akibat tindakan kriminal yang menimpanya. Dengan adanya definisi yang lebih jelas ini, diharapkan korban mendapatkan perhatian lebih dalam sistem peradilan pidana, termasuk akses terhadap perlindungan hukum, pemulihan psikologis, serta kompensasi atas kerugian yang diderita. Hal ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus kejahatan, sehingga hak-hak korban dapat dipenuhi secara optimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, Anak Korban Jaringan Terorisme adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana terorisme. Definisi ini mencakup tidak hanya anak yang menjadi korban langsung dari aksi terorisme, tetapi juga anak yang terlibat sebagai pelaku, anak dari pelaku tindak pidana terorisme, serta anak yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terdampak oleh jaringan terorisme mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan mereka dapat terhindar dari stigma sosial serta memperoleh rehabilitasi psikososial, pendidikan, dan pendampingan hukum guna mengurangi dampak negatif yang mereka alami serta mendukung mereka dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Adapun korban harus mendaptkan perlindungan yaitu karena korban mengalami penderitaan atau kerugian oleh karna itu korban harus mendaptkan perhatian.

Menurut Marjdono Reksodiputro dalam bukunya H. Soeharto yaitu:

* 1. Sistem peradilan pidana saat ini masih cenderung berfokus pada pelaku kejahatan (offender-centered), sehingga aspek perlindungan, pemulihan, dan keadilan bagi korban sering kali terabaikan.
  2. Informasi yang diberikan oleh korban memiliki potensi besar dalam memperjelas serta melengkapi penafsiran terhadap statistik kriminal. Melalui penelitian dan data tentang korban, sistem peradilan pidana dapat lebih memahami dinamika kejahatan serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lebih adil. Perlu dipahami bahwa korban memiliki peran penting dalam menggerakkan mekanisme peradilan pidana.
  3. Selain korban kejahatan konvensional, semakin disadari bahwa korban dari kejahatan nonkonvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan juga memerlukan perhatian serius. Bentuk kejahatan ini sering kali tidak terlihat secara langsung, namun dampaknya dapat sangat besar terhadap individu maupun masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pendekatan dalam sistem peradilan pidana perlu mencakup perlindungan yang lebih luas bagi seluruh jenis korban kejahatan.[[37]](#footnote-37)

## Tinjauan Umum Tentang Restitusi

* 1. Pengertian restitusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), restitusi diartikan sebagai pembayaran kembali, ganti rugi, atau penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Dalam konteks hukum, restitusi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang tersebut, restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Restitusi mencakup kompensasi atas kerugian materiil, seperti biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan, serta kerugian immateriil, seperti penderitaan psikis yang dialami korban atau ahli warisnya. Dengan adanya mekanisme restitusi, diharapkan hak-hak korban dapat dipenuhi secara adil, sehingga mereka mendapatkan pemulihan yang layak atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana yang dialami.

Restitusi di Indonesia diatur dalam berbagai Undang-Undang Pidana Khusus di luar KUHP, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 35 ayat (3) disebutkan bahwa setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan/atau ahli warisnya berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memulihkan hak-hak korban, terutama dalam kasus pelanggaran HAM berat. Restitusi menjadi salah satu mekanisme penting untuk memberikan keadilan bagi korban dengan memastikan bahwa mereka menerima ganti rugi atas penderitaan yang dialami. Selain itu, kompensasi dan rehabilitasi juga berperan dalam memberikan dukungan psikososial dan pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi sebagai bentuk pemulihan atas dampak yang mereka alami. Dalam Pasal 36, dinyatakan bahwa korban atau ahli warisnya berhak mengajukan kompensasi dan/atau restitusi akibat tindak pidana terorisme. Hak ini dipertegas dalam Pasal 37, yang memastikan bahwa korban atau ahli warisnya berhak menerima kompensasi atau restitusi. Lebih lanjut, Pasal 38 mengatur mekanisme pengajuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, sedangkan Pasal 39 menetapkan rentang waktu untuk mengajukan kompensasi dan restitusi. Sementara itu, Pasal 40 mengatur pelaksanaan kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana terorisme. Dengan adanya regulasi ini, negara menunjukkan perhatian khusus terhadap pemulihan hak-hak korban terorisme melalui jalur hukum yang jelas dan terstruktur. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak agar dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang secara tegas menjamin hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti kerugian akibat tindak pidana tersebut. Pasal 48 mengatur bahwa korban atau ahli warisnya berhak menerima restitusi yang mencakup kompensasi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang dialami, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang timbul akibat perdagangan orang. Hak restitusi ini harus dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan pengadilan, dan pemberiannya mulai berlaku sejak putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan. Jika diperlukan, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus, dan harus diberikan dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila terdakwa dinyatakan bebas dalam tingkat banding atau kasasi, hakim wajib memerintahkan pengembalian uang restitusi yang telah dititipkan kepada pihak yang bersangkutan. Dengan adanya mekanisme yang jelas dan terstruktur ini, diharapkan hak-hak korban perdagangan orang dapat dipenuhi secara adil dan efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi, tetapi juga menetapkan mekanisme pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel dalam Pasal 49. Pelaksanaan pemberian restitusi harus dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Setelah menerima tanda bukti tersebut, ketua pengadilan memiliki kewajiban untuk mengumumkan pelaksanaan restitusi di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan guna memastikan transparansi dalam prosesnya. Selain itu, salinan tanda bukti pemberian restitusi harus disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya sebagai bentuk dokumentasi resmi yang dapat dijadikan dasar hukum dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Ketentuan ini dirancang untuk menjamin bahwa restitusi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak, sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana terkait pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, mengatur tentang kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Dalam UU PSK, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mencakup kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Sementara itu, kompensasi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tindak pidana terorisme, apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin hak-hak korban dalam aspek pemulihan fisik, mental, dan ekonomi, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan serta perlindungan yang layak dalam sistem hukum Indonesia.

Restitusi lahir sebagai respons terhadap gerakan yang menyoroti hak-hak korban, yang mengkritisi kecenderungan sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan dibandingkan dengan korban. Gerakan ini menekankan perlunya perubahan paradigma dalam sistem hukum, sehingga perhatian terhadap pemulihan korban menjadi bagian integral dari proses peradilan. Selama ini, sistem peradilan lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban. Oleh karena itu, restitusi hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh ganti kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Lebih dari sekadar kompensasi finansial, restitusi juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana, sehingga tidak hanya berpusat pada pelaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang layak.[[38]](#footnote-38)

Dalam sistem peradilan pidana, korban kejahatan sering kali menghadapi perlakuan yang tidak adil dan diabaikan, padahal seharusnya mereka mendapatkan dukungan, informasi, dan bantuan yang memadai. Restitusi, meskipun hanya merupakan satu bagian dari upaya yang lebih luas dalam memenuhi hak-hak korban, memiliki peran penting dalam memastikan pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang mereka timbulkan, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil. Melalui mekanisme ini, korban tidak hanya dianggap sebagai objek dalam proses hukum, tetapi juga diberikan hak untuk memperoleh pemulihan yang layak atas penderitaan yang mereka alami. Dengan demikian, restitusi menjadi instrumen yang memperkuat prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan keseimbangan hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana.[[39]](#footnote-39)

Restitusi memiliki beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang bertujuan untuk memberikan pemulihan menyeluruh bagi korban. Pertama, restitusi berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan atau penghasilan, yang memungkinkan korban mendapatkan penggantian atas kerugian finansial yang diderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kedua, ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, yang mencakup kompensasi atas penderitaan fisik, mental, atau emosional yang dialami korban akibat tindakan pelaku. Ketiga, restitusi dalam bentuk penggantian biaya medis dan/atau psikologis, yang mencakup biaya perawatan kesehatan dan pemulihan psikologis bagi korban setelah mengalami tindak pidana. Dengan adanya ketiga bentuk restitusi ini, diharapkan korban tidak hanya mendapatkan keadilan hukum, tetapi juga pemulihan secara ekonomi, fisik, dan psikologis, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.[[40]](#footnote-40)

Konsep restitusi harus mencerminkan prinsip keadilan bagi korban dan keluarganya dengan memastikan bahwa mereka menerima ganti kerugian yang adil, proporsional, dan sesuai dengan dampak yang mereka alami akibat tindak pidana. Restitusi bukan hanya sekadar bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Melalui restitusi, diharapkan korban dapat memperoleh kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang mereka derita, termasuk kehilangan penghasilan, biaya perawatan medis, penderitaan psikologis, serta berbagai dampak lainnya. Dengan adanya mekanisme restitusi yang efektif, korban tidak hanya mendapatkan hak-haknya secara hukum, tetapi juga memiliki kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara normal tanpa terbebani oleh dampak negatif dari kejahatan yang mereka alami. Oleh karena itu, sistem peradilan harus memastikan bahwa pelaksanaan restitusi berjalan dengan transparan, adil, dan tepat sasaran, sehingga dapat benar-benar memberikan manfaat bagi korban dan keluarganya. Ganti kerugian dalam restitusi mencakup beberapa aspek utama, antara lain: 1. Pengembalian Kerugian yang Diderita - Meliputi kompensasi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan akibat tindak pidana. 2. Penggantian Biaya yang Timbul Akibat Jatuhnya Korban - Termasuk biaya medis, psikologis, rehabilitasi, serta biaya hukum yang diperlukan dalam proses pemulihan korban. 3. Penyediaan Jasa dan Hak-hak Pemulihan - Mencakup akses terhadap layanan kesehatan, konseling psikologis, bantuan hukum, serta dukungan sosial bagi korban dan keluarganya. Konsep ini menegaskan bahwa restitusi tidak hanya sebatas kompensasi finansial, tetapi juga mencakup aspek pemulihan menyeluruh bagi korban, sehingga mereka dapat memperoleh kembali hak-hak dan kesejahteraan yang terganggu akibat tindak pidana.[[41]](#footnote-41)

Sanksi restitusi yang diberikan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya, hakim juga wajib menetapkan besarnya restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga secara finansial atas kerugian yang dialami korban, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Dengan adanya kewajiban restitusi, korban diharapkan dapat memperoleh pemulihan yang layak dan adil, terutama dalam mengatasi dampak fisik, psikologis, serta ekonomi akibat tindak pidana yang dialaminya. Selain itu, penerapan restitusi juga mencerminkan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, di mana fokus tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban sebagai pihak yang terdampak langsung. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penetapan restitusi dilakukan secara proporsional, berdasarkan tingkat kerugian yang dialami korban, serta dengan mekanisme yang efektif agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal. Restitusi ini menjadi kewajiban hukum bagi pelaku jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Ketentuan ini menegaskan bahwa restitusi bukan sekadar bentuk hukuman tambahan bagi pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung terhadap korban atas kerugian yang diderita.

Perbedaan utama antara kompensasi dan restitusi terletak pada siapa yang membayar serta cara pemberiannya: 1. Restitusi Dituntut oleh korban dalam proses peradilan dan harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana. Jika pengadilan mengabulkan tuntutan, pelaku wajib membayar ganti kerugian langsung kepada korban. 2. Kompensasi Diminta berdasarkan permohonan korban dan dibayarkan oleh negara atau masyarakat jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Meskipun terdapat perbedaan hukum, dalam praktiknya, yang lebih penting adalah bagaimana korban mendapatkan perhatian dan pemulihan atas penderitaannya. Baik melalui restitusi maupun kompensasi, tujuan akhirnya adalah memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Konsep ganti rugi dalam hukum pidana harus mempertimbangkan tiga elemen utama: 1. Delik (Tindak Pidana) Perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. 2. Pelaku (Dader) Orang yang melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas akibatnya. 3. Korban Pihak yang dirugikan akibat tindak pidana, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam hal ini, kerugian materiil mencakup kehilangan harta benda, biaya medis, atau kehilangan penghasilan, sedangkan kerugian immateriil meliputi penderitaan psikologis, trauma, atau gangguan emosional yang dialami korban. Pemberian restitusi atau kompensasi bertujuan untuk memulihkan keadaan korban semaksimal mungkin, sesuai dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Benar, penggantian kerugian materiil lebih mudah dihitung karena dapat diukur secara konkret, seperti biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, atau kerusakan properti. [[42]](#footnote-42) Namun, kerugian immateriil seperti kesusahan, kecemasan, rasa malu, atau trauma psikologis lebih sulit untuk dinilai secara objektif. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, kompensasi atas kerugian ini sering disebut sebagai "uang duka" atau "ganti rugi immateriil" yang diberikan dalam bentuk sejumlah uang sebagai bentuk keadilan bagi korban. Dalam praktiknya, hakim biasanya mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menetapkan besaran ganti rugi immateriil, seperti tingkat penderitaan korban, dampak jangka panjang, serta kondisi sosial dan ekonomi korban. [[43]](#footnote-43)

Pendapat para pakar hukum menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga kepada korban, yang sering kali mengalami dampak serius akibat kejahatan yang menimpanya. Dalam sistem peradilan pidana yang adil, korban harus mendapatkan hak-hak yang setara, termasuk hak atas ganti rugi atau restitusi untuk mengkompensasi kerugian yang dideritanya, baik secara materiil maupun immateriil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Oleh karena itu, memasukkan kepentingan korban dalam proses peradilan pidana merupakan langkah penting dalam menciptakan keseimbangan antara hak-hak pelaku dan korban dalam sistem hukum. Lebih jauh, restitusi dan kompensasi bukan hanya sekadar bentuk pertanggungjawaban individu pelaku terhadap korban, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi masyarakat secara luas. Dengan mengedepankan aspek restoratif, sistem peradilan pidana tidak hanya bersifat retributif yang menitikberatkan pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memiliki dimensi pemulihan yang memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang layak.

Restitusi bukan hanya sekadar kompensasi finansial bagi korban, tetapi juga memiliki fungsi lebih luas dalam sistem peradilan pidana. 1. Sebagai Ganti Rugi bagi Korban Restitusi berfungsi untuk mengembalikan kerugian yang diderita korban, baik itu kerugian materiil (seperti biaya medis dan kehilangan penghasilan) maupun kerugian immateriil (seperti penderitaan psikologis). 2. Sebagai Bagian dari Pemidanaan Pelaku Restitusi juga dapat dianggap sebagai bagian dari sanksi pidana yang membebankan tanggung jawab kepada pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban. 3. Sebagai Instrumen Pencegahan Kejahatan Dengan adanya restitusi, pelaku kejahatan diberikan peringatan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya secara pidana (penjara/denda) tetapi juga secara finansial. Ini bisa menjadi efek jera bagi pelaku lain agar berpikir ulang sebelum melakukan tindak pidana. Namun, restitusi sering kali belum cukup untuk mengatasi penderitaan korban, terutama untuk kerugian immateriil seperti trauma dan gangguan mental. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk layanan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban.

Restitusi memiliki nilai moral dan tanggung jawab yang lebih langsung dibandingkan dengan denda. 1. Mendorong Pelaku Mengakui Kesalahannya Restitusi memaksa pelaku untuk secara langsung mengakui dampak dari tindakannya. Ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban pribadi kepada korban. 2. Bersifat Personal dan Memiliki Dimensi Pemulihan Berbeda dengan denda yang dibayarkan kepada negara, restitusi langsung diberikan kepada korban, sehingga dampaknya lebih terasa dalam proses pemulihan korban. 3. Membantu Proses Rehabilitasi Sosial Dengan membayar restitusi, pelaku kejahatan dapat menunjukkan itikad baik dalam memperbaiki kesalahannya. Hal ini dapat membantu dalam proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Namun, efektivitas restitusi sering kali tergantung pada kemampuan finansial pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin tidak memiliki cukup sumber daya untuk membayar restitusi, sehingga negara perlu memastikan mekanisme yang adil bagi korban untuk mendapatkan haknya.

1. Imas Nurjamillah Siti Ngainnur Rohmah, ‘Urgensi Optimalisasi Perlindungan’, 2021. https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3665 [↑](#footnote-ref-1)
2. Siti Ngainnur Rohmah, ‘Urgensi Optimalisasi Perlindungan’, 2021 https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3665 [↑](#footnote-ref-2)
3. Noel Stocks, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2016. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/2334/2256 [↑](#footnote-ref-3)
4. Safitri, Didi Ardiansah, and Prasetyo, Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UUhttps://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/173 [↑](#footnote-ref-4)
5. 2017 Jusnita nina, ‘UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA’, 105.3 (1945), 129–33 <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Supriyanto, ‘“PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA. 1–9.”’, 1–9. https://www.neliti.com/id/publications/23566/perkembangan-sistem-peradilan-pidana [↑](#footnote-ref-6)
7. Hasanuddin Muhammad, ‘Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual’, *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9.1 (2022), 1 <https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22495>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Siswantoro Sunarso, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 49. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahadi, Mursyid, and Wulandari, https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/254/111. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad, " Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/22495 [↑](#footnote-ref-10)
11. Pratikno, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 16100, 2023, 1–345. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023 [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ahadi, Mursyid, and Wulandari, “Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/254/111 [↑](#footnote-ref-13)
14. Kurniawan, Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi” https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika\_Hukum/article/view/8458 [↑](#footnote-ref-14)
15. Joy Arta, ‘Asas-Asas, Pengertian Sistem Peradilan Pidana Peraturan Perundang-Undangan Dan Advokat Di Indonesia’, 2018, 1–58. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/961/05.2%20bab%202.pdf?seque [↑](#footnote-ref-15)
16. Safitri, Didi Ardiansah, and Prasetyo, Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UUhttps://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/173 [↑](#footnote-ref-16)
17. [↑](#footnote-ref-17)
18. Eko Nurisman, ‘Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4.2 (2022), 170–96 <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>. [↑](#footnote-ref-18)
19. Siti Fatimah, Hak korban kekerasan seksual, program studi adminiatrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023, https://repository.uin-suska.ac.id/view/divisions/ek=5Fan/2023.default.html [↑](#footnote-ref-19)
20. Windi Helvira, ‘Representasi Kenakalan Remaja Pada Film “Di Bawah Umur”’, *172050235 (2022) representasi kenakalan remaja pada film "dibawah umur". Skripsi(S1) Thesis, FISIP UNPAS.*, 4.1 (2021). https://eprints.iain-surakarta.ac.id/3543/1/Ucik%20Erlinda%20Intan%20Sari\_171221072.pdf [↑](#footnote-ref-20)
21. [↑](#footnote-ref-21)
22. Christine Napitupulu and others, "MEMPERDAGANGKAN ANAK DIBAWAH UMUR SECARA ONLINE", 2023. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/30590/1/T1\_312019147\_Judul.pdf [↑](#footnote-ref-22)
23. Dwiky Adriansyah, Fajar Ari Sudewo, and Fajar Dian Aryani, “Kebijakan Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pemerkosa Anak‟, 2024, 21–36. [↑](#footnote-ref-23)
24. Hamidah Abdurrachman and others, “Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan‟, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10.1 (2022), 23–41 <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.141>. [↑](#footnote-ref-24)
25. Farida Nugrahani*, Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014, hlm. 25. [↑](#footnote-ref-25)
26. Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, “Kekerasan Seksual dan Perceraian”, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17 [↑](#footnote-ref-26)
27. Siti Ngainnur Rohmah, ‘Urgensi Optimalisasi Perlindungan’, 2021 https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3665 [↑](#footnote-ref-27)
28. Raineka Faturani, “Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, *Jurnan Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 8, no. 15, 9, 2022, 480.

    https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2095/1780 [↑](#footnote-ref-28)
29. Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

    https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/upload/2018/10/01\_format\_artikel\_ejurnal\_mulai\_hal\_Ganjil-1%20(10-04-18-02-08-52).pdf. [↑](#footnote-ref-29)
30. Romli Atmasasmitha,”Teori & Kapita Selekta Kriminologi”, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55. [↑](#footnote-ref-30)
31. ”Pengertian seks dan seksualitas” diakses tanggal 17/01/2025 pukul 00.40 https://pkbi-diy.info/ [↑](#footnote-ref-31)
32. ND Jayanti, “Kekerasan seksual”, 2019 https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16708/05.3%.203.pdf?sequennce=6&isAllowed [↑](#footnote-ref-32)
33. Pemvet repertum, “Tindak Pidana Pemerkosaan”. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3819/3/102211026\_Bab2.pdf [↑](#footnote-ref-33)
34. Arif Gosita, “masalah korban kejahatan”, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63 [↑](#footnote-ref-34)
35. Romli Atmasasmita, “masalah santunan korban kejahatan”, BPHN, Jakarta, hlm 9 [↑](#footnote-ref-35)
36. Muladi, ”Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm 108 [↑](#footnote-ref-36)
37. H. Soeharto, “Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-37)
38. Ara Ramadhani, ahmad sholikhin ruslie, “pemenuhan hak restitusi kepada korban tindak pidana”, Surabaya, bureaucracy journal, 2022, hal 825

    file:///C:/Users/user/Downloads/65-Article%20Text-242-1-10-20221226.pdf [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid., hal 827 [↑](#footnote-ref-39)
40. Ibid., [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid., hal 828 [↑](#footnote-ref-41)
42. Suparman, “Kepentingan Korban Tindak Pidana dilihat dari Sudut Viktimologi”, Majalah Hukum FH-UI tahun ke-XXII No. 260, Juli 2007, hlm 50 [↑](#footnote-ref-42)
43. Sudarto, “Hukum Dan Hukum Pidana”, Bandung, 1986, Hal 183-184 [↑](#footnote-ref-43)